

Seknas FITRA  
28 Oktober 2015

### **Dinamika Politik Anggaran RAPBN 2016 : Saling Menyandera Kepentingan**

Hingga saat ini (28/10), pembahasan RAPBN 2016 masih belum final. Hal ini sudah molor dari jadwal awal disahkan pada 22/10, kedepan bahkan dua hari lagi (30/10) finalisasi persetujuan RAPBN 2016 dikhawatirkan menemui jalan buntu. Diduga ada upaya kepentingan politik yang menyandera pembahasan RAPBN 2016.

Secara umum, postur anggaran RAPBN 2016 sudah disetujui Pemerintah dan Badan Anggaran DPR pada (15/10). Yaitu :

1. Pendapatan negara turun dari Rp 1.841,1 triliun menjadi Rp 1.822,5 triliun. Hal ini terjadi seiring dengan dipangkasnya target penerimaan pajak dari Rp 1.565,8 triliun menjadi hanya Rp 1.546,7 triliun. Begitu juga pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dipotong dari Rp 280 triliun menjadi Rp 273,8 triliun.
2. Belanja Pemerintah dipangkas anggaran belanja Rp 25,6 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 2.121,3 triliun, diturunkan jadi Rp 2.095,7 triliun. Adapun, belanja pemerintah pusat berkurang Rp 13,5 triliun dari Rp 1.339,1 triliun menjadi Rp 1.325,6 triliun. Perinciannya, anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) naik dari Rp 780,4 triliun menjadi Rp 784,1 triliun, dan anggaran non K/L susut dari Rp 558,7 triliun menjadi Rp 541,4 triliun.
3. Defisit anggaran dipatok naik jadi 2,15 persen atau setara dengan Rp 273,2 triliun dari sebelumnya sebesar 2,14 persen. Adanya penurunan target penerimaan dan belanja ini kemudian berimbas pada target pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari semula 5,5% menjadi 5,3 persen.

Sedangkan beberapa isu sektoral yang diduga menjadi potensi konflik yaitu :

#### **1. PMN BUMN 97 T (APBNP 2015-RAPBN 2016) Triliun dalam 8 bulan untuk apa ?**

Banggar-Pemerintah telah menyetujui penambahan PMN BUMN sebesar Rp. 34,3 Triliun dari usulan pemerintah Rp. 33 Triliun.

Padahal, pendapatan bagian laba BUMN pada tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp 31 Triliun , lebih rendah sebesar Rp 5. Triliun atau 15,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 36 triliun.. Setiap tahun, target penerimaan dari BUMN selalu turun, seperti target APBN 2015 sebesar Rp. 44 Triliun namun tidak tercapai.

#### **2. Transfer Daerah meningkat, Dana desa meningkat dan DAK rawan dibajak dengan syarat dari DPR.**

Dalam RAPBN 2016 ini, peningkatan signifikan terjadi pada transfer ke daerah dan desa dari APBNP 2015 sebesar Rp. 664 Triliun, naik Rp. 117 triliun pada RAPBN 2016 menjadi Rp. 782 Triliun. Dari alokasi tersebut, dana transfer ke daerah sebesar Rp. 91 Triliun dan dana desa naik Rp. 26 Triliun menjadi Rp. 47

Triliun. Untuk transfer daerah ini, DPR meminta untuk memasukan syarat pencairan DAK harus oleh DPR.

Selain itu, dalam pasal 12 DPR juga memasukan pasal dapat mengelola anggaran, meskipun ditolak oleh Pemerintah, upaya ini masih masif diperjuangkan oleh DPR agar dapat menjadi eksekutor anggaran. DPR juga mengusulkan kenaikan anggaran Rp. 740 M diluar nota APBN diduga untuk pembangunan gedung DPR.

**Padahal, seharusnya DPR dan Pemerintah fokus pada pembahasan anggaran yang pro rakyat yaitu :**

**1. Belanja Kesehatan Justru Turun.**

Belanja Negara pada RAPBN 2016 ditargetkan sebesar Rp. 2.121,3 triliun, naik Rp. 137 Triliun dibandingkan dengan APBNP 2015 sebesar Rp. 1.984,1 Triliun. Sektor kenaikan terbanyak terjadi pada belanja Lembaga Negara, sedangkan belanja Kementrian justru menurun. Misalnya, belanja kesehatan Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp18.685,3 miliar, **menunjukkan penurunan sebesar 22,8 persen** apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp24.208,5 miliar. Alokasi ini diklaim telah memenuhi amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa alokasi anggaran kesehatan adalah sebesar 5 persen dari belanja negara. **Padahal realitanya, anggaran kesehatan belum sesuai dengan amanat konstitusi.**

**2. Defisit selalu meningkat, akibatnya penarikan utang juga meningkat.**

Defisit RAPBN 2016 ditaksir sekitar Rp. 273 Triliun, naik Rp. 55 Triliun dibandingkan dengan APBNP 2015 yang hanya Rp. 222 Triliun. Untuk menutupi defisit tersebut, Pemerintah menargetkan utang sebesar RP. 183,4 Triliun, naik Rp. 28 triliun dari APBNP 2015 Rp 155 triliun. Kenaikan hutang tersebut terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp. 176 Triliun dan utang luar negeri sebesar Rp. 16 Triliun.

**3. Belanja Subsidi Untuk Rakyat terus menurun, sasaran subsidi belum tepat sesuai kebutuhan rakyat.**

Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan mencapai Rp201.363,6 miliar. Jumlah tersebut menurun Rp10.740,8 miliar bila dibandingkan dengan pagu Program Pengelolaan Subsidi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp212.104,4 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp120.957,2 miliar, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp70.957,2 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp50.000,0 miliar. Sementara itu, untuk subsidi nonenergi sebesar Rp80.406,4 miliar, terdiri atas: (1) subsidi pangan sebesar Rp20.993,4 miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp30.063,2 miliar; (3) subsidi benih sebesar Rp1.023,8 miliar; (4) subsidi PSO sebesar Rp3.752,5 milar; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp16.474,5 miliar; (6) subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp8.099,1 miliar.

**4. Belanja Infrastruktur terus meningkat, namun infrastruktur untuk Kerakyatan Berkurang (perumahan rakyat).**

Anggaran Infrastruktur pada RAPBN 2016 meningkat Rp. 313 Triliun dari APBNP tahun 2015 sebesar Rp. 290 Triliun. Meningkat Rp. 23 Triliun Rupiah. Namun, dari alokasi tersebut, anggaran perumahan rakyat justru menurun. Anggaran yang dialokasikan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp 23 Triliun, yang berarti lebih rendah sebesar 9,7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp 25 triliun.

**5. Belanja Maritim mengalami penurunan dan belum terfokus pada penguatan infrastruktur belum pada penguatan masyarakat nelayan dan maritim.**

Dalam RAPBN 2016 kelompok bidang Kemaritiman direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80.748,9 miliar pada RAPBN tahun 2016. Jumlah tersebut lebih rendah Rp12.414,2 miliar atau 13,3 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp93.163,2 miliar. Khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami kenaikan Rp. 5 Triliun dari APBNP 2015 sebesar Rp. 10 Triliun menjadi Rp. 15 Triliun pada RAPBN 2016. Dan disetujui oleh DPR menjadi Rp. 11 Triliun.

Rekomendasi :

1. Menjelang disahkan, pemerintah dan DPR seharusnya fokus pada politik anggaran yang berpihak pada rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu. Postur dan alokasi anggaran untuk kesehatan, dana desa dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan.
2. DPR dan pemerintah harus segera mengesahkan APBN 2016 agar tidak terjadi ruang transaksional yang lebih koruptif.

Demikian  
Apung Widadi  
Koordinator Advokasi FITRA  
085293939999